

Temu Bisnis Tahap VII

Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dalam
Rangka Mendukung Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia

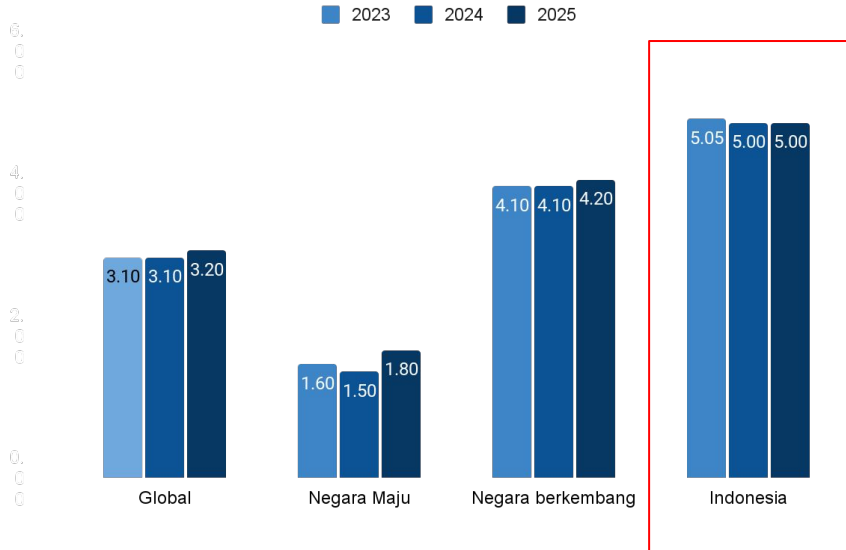
Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

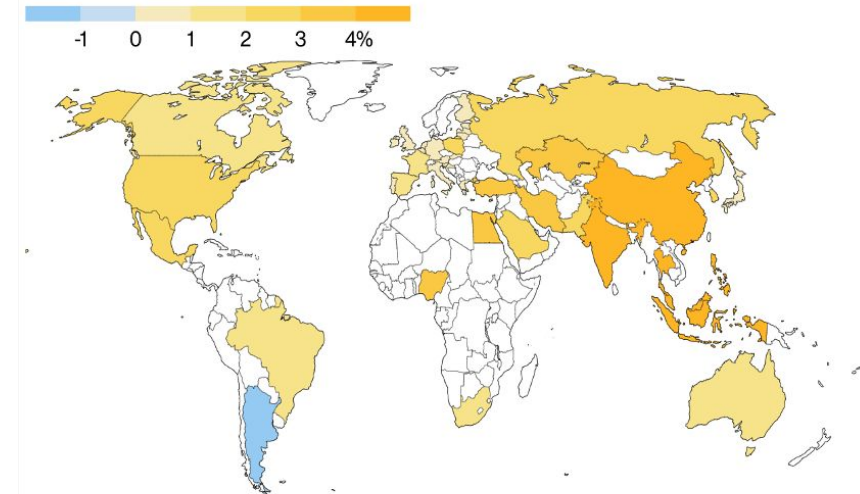


**BANGGA BUATAN
INDONESIA**

Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dari Global



Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: World Economic Outlook Update, Januari 2024

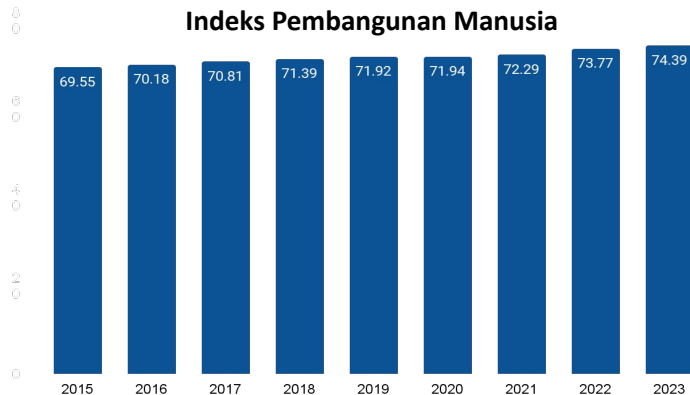


Gambar 2. Proyeksi GDP Dunia
Sumber: IMF

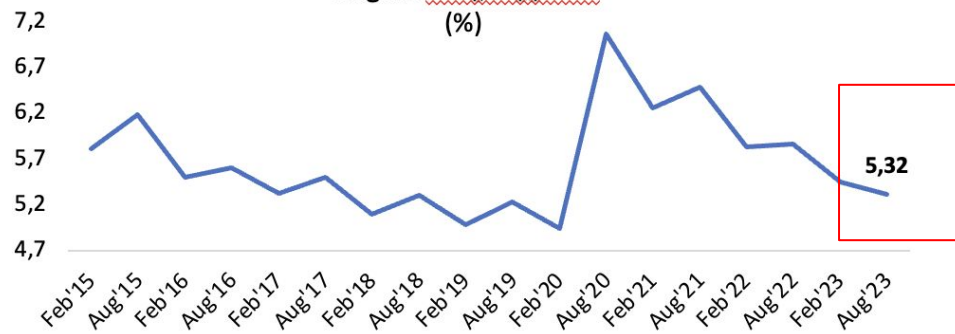
IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan stagnan dan baru akan meningkat di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan lebih baik dari global.

Indikator Sosial turut membaik

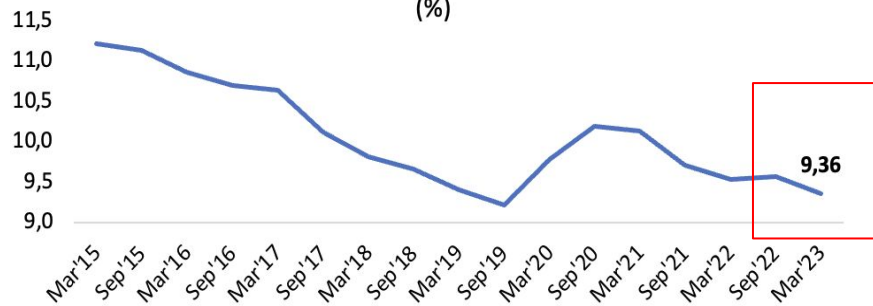
Indeks Pembangunan Manusia



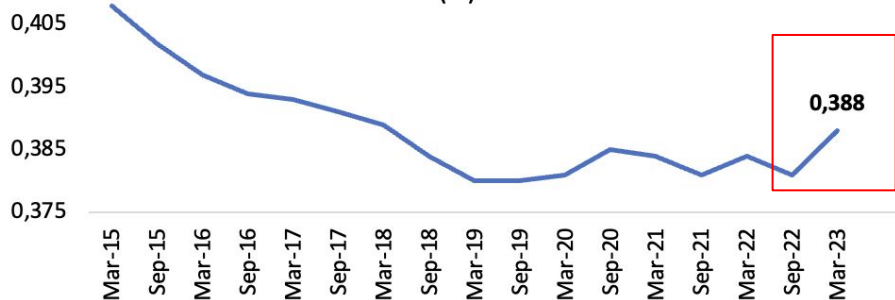
Tingkat Pengangguran (%)



Tingkat Kemiskinan (%)



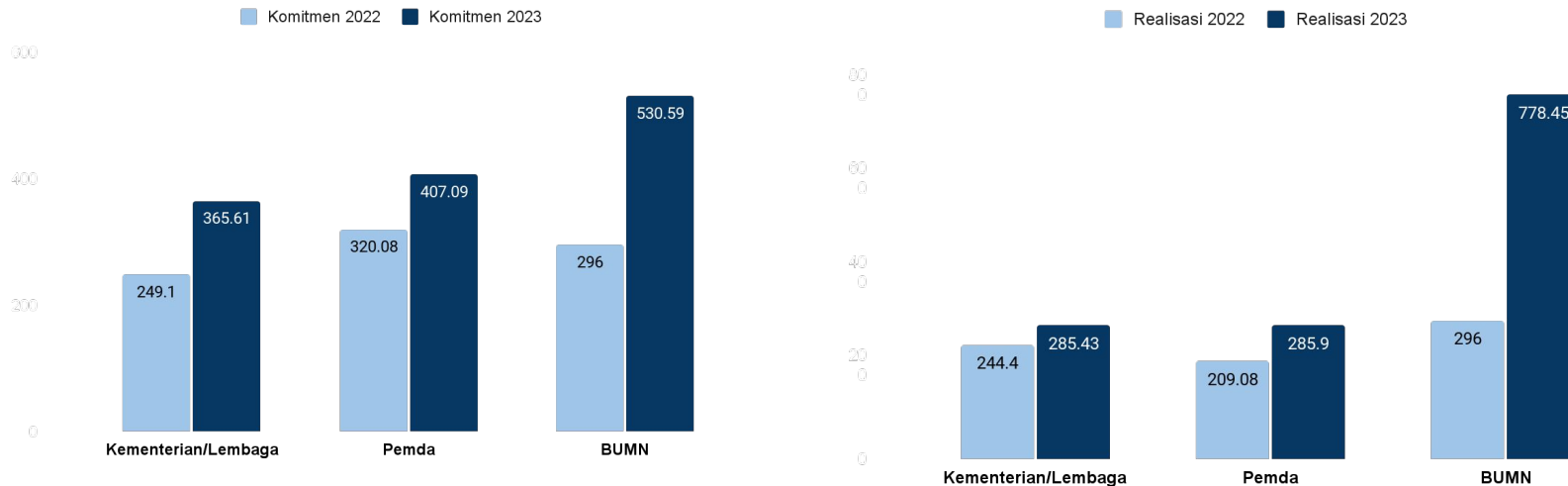
Rasio Gini (%)



Gambar 3. Perbandingan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan gini ratio

Sumber: BPS

Capaian PDN Terus Meningkat



Gambar 4. Perbandingan komitmen dan realisasi PDN

Sumber: LKPP dan KemenBUMN

- Komitmen belanja tahun 2023 sebesar Rp 1.303,32 triliun, meningkat 51% dari tahun 2022 yang sebesar Rp 865 triliun. Peningkatan komitmen terbesar bersumber dari BUMN dan K/L.
- Tingkat realisasi belanja meningkat 80% dari Rp 749,5 triliun menjadi **Rp 1349,8 triliun**, ditopang oleh BUMN.
- Pada 2024, target capaian belanja K/L, dan pemda 95% dari anggaran belanja.

Realisasi Pengadaan Produk Dalam Negeri (Top 10 BUMN)



No.	Top 10 BUMN	Realisasi PDN 239,36(Rp, Triliun)	% Realisasi Thd Total Komitmen BUMN 2023
1	PT Pertamina	356,14	67,12%
2	PT Perusahaan Listrik Negara	278,57	52,50%
3	PT Pupuk Indonesia	40,79	7,69%
4	Perum BULOG	23,82	4,49%
5	PT Semen Indonesia	21,58	4,07%
6	PT Telkom Indonesia	17,87	3,37%
7	PT Hutama Karya	17,40	3,28%
8	PT Kereta Api Indonesia	8,75	1,65%
9	PT Perkebunan Nusantara III	10,09	1,90%
10	PT Adhi Karya	3,44	0,65%
Total		778,45	146,71%

Tabel 1 Realisasi Belanja PDN Top 10 BUMN
Sumber: Kementerian BUMN (per 31 Desember 2023)

Capaian Realisasi PDN (Top 15 K/L Anggaran Terbesar)



No.	15 K/L Anggaran Terbesar*	Nilai Perencanaan Belanja (Rp, Triliun)	Nilai Komitmen PDN (Rp, Triliun)	%Komitmen PDN Thd Perencanaan Belanja (%)	Nilai Realisasi PDN (Rp, Triliun)	%Realisasi PDN Thd Komitmen (%)
1	Kejaksaan Republik Indonesia	6,89	3,22	46,73	3,51	108,94
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	122,4	118,02	96,42	122,13	103,49
3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	9,63	8,97	93,15	8,6	95,94
4	Kementerian Pertahanan	71,28	51,94	72,87	47,71	91,85
5	Mahkamah Agung	3,22	2,19	68,01	1,87	85,38
6	Kepolisian Negara Republik Indonesia	43,33	27,56	63,60	22,81	82,78
7	Kementerian Pertanian	13,84	7,53	54,41	5,84	77,45
8	Kementerian Perhubungan	28,12	24,47	87,02	15,94	65,14
9	Kementerian Keuangan	10,88	8,66	79,60	5,43	62,67
10	Kementerian Sosial	0,92	0,76	82,61	0,47	61,04
11	Komisi Pemilihan Umum	13,05	4,23	32,41	2,5	59,13
12	Kementerian Agama	25,95	7,59	29,25	4,46	58,76
13	Kementerian Kesehatan	30,96	19,14	61,82	9,65	49,98
14	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27,97	18,03	64,46	6,08	33,70
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	16,04	11,94	74,44	3,39	28,41

Tabel 2 Realisasi Belanja PDN Top 15 K/L
Sumber: LKPP (31 Desember 2023)

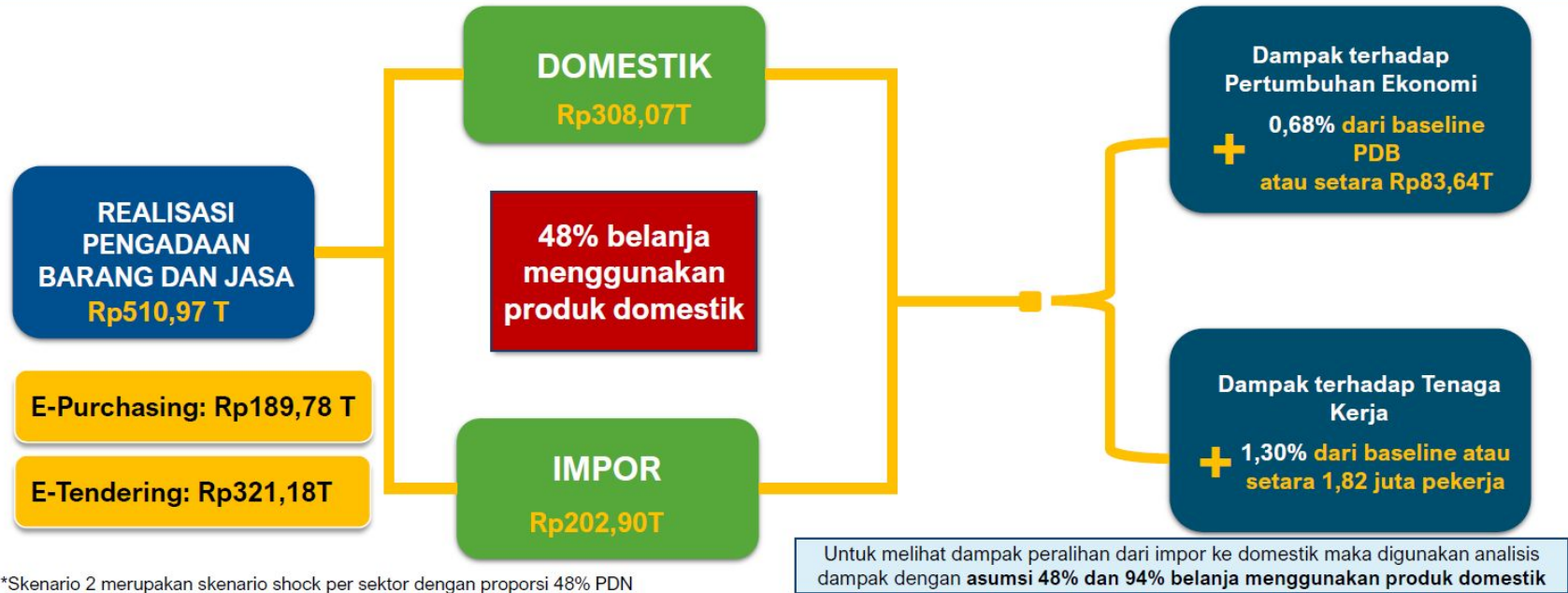
Capaian Realisasi PDN (Top 10 Pemprov Anggaran Terbesar)



No.	Provinsi	Nilai Perencanaan Belanja (Rp, Triliun)	Nilai Komitmen PDN (Rp, Triliun)	%Komitmen PDN Thd Perencanaan (%)	Nilai Realisasi (Rp, Triliun)	%Realisasi PDN dari Komitmen (%)
1	PROVINSI JAWA TENGAH	8,19	4,03	49,21	3,96	98,24
2	PROVINSI RIAU	5,09	3,14	61,69	2,72	86,65
3	PROVINSI BANTEN	5,98	3,23	54,01	2,73	84,73
4	PROVINSI SUMATERA SELATAN	2,63	1,77	67,30	1,49	84,14
5	PROVINSI JAWA TIMUR	14,16	6,38	45,06	5,29	82,85
6	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	10,80	6,72	62,22	5,50	81,81
7	ACEH	5,97	2,81	47,07	2,14	76,08
8	PROVINSI DKI JAKARTA	37,46	29,21	77,98	20,64	70,65
9	PROVINSI JAWA BARAT	9,45	7,32	77,46	4,47	61,03
10	PROVINSI SUMATERA UTARA	7,12	4,05	56,88	1,50	37,13

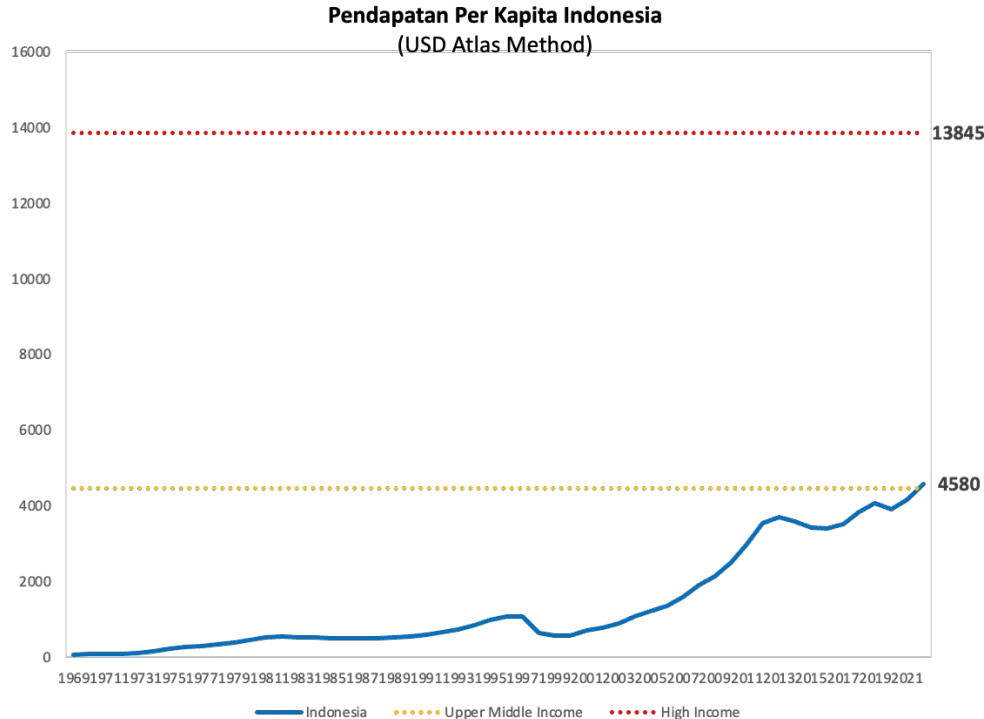
Tabel 3 Realisasi Belanja PDN Top 10 Provinsi Anggaran Terbesar
Sumber: LKPP (per 31 Desember 2023)

Aksi Afirmasi Belanja PDN Memberikan Dampak Ekonomi Signifikan



Gambar 5. Dampak Ekonomi Belanja PDN 2023
Sumber: Bappenas

Aksi Afirmasi Belanja PDN Mendukung Indonesia Maju 2045



Gambar 6. Pendapatan Perkapita Menuju Indonesia Maju 2045
Sumber: Bappenas

3 LANGKAH AKSI AFIRMASI PDN MENDUKUNG INDONESIA MAJU

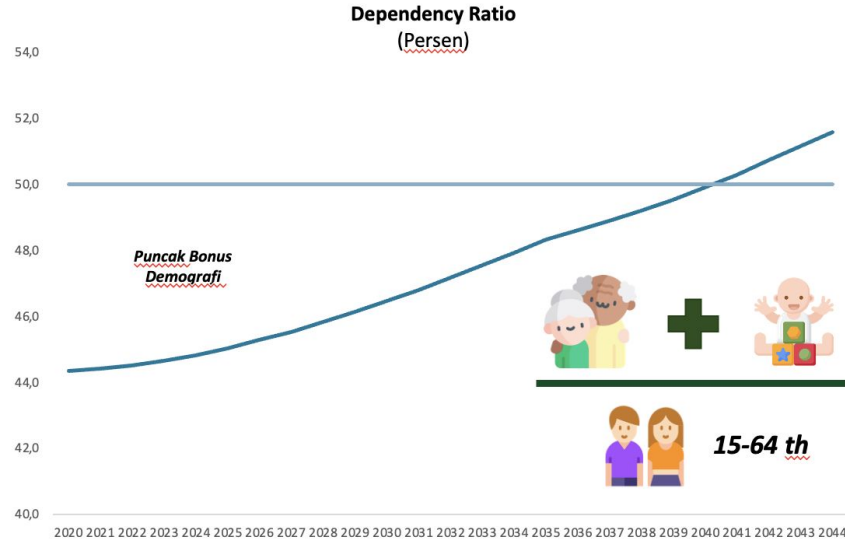
- 1 Memberikan kepastian penyediaan *demand* ke industri
- 2 Mendorong pengembangan industri dan inovasi PDN
- 3 Mendorong peningkatan investasi untuk pengembangan PDN

Enam Strategi Penguatan Implementasi Aksi Afirmasi Belanja PDN



- 1 Perbaiki proses belanja internal yang terdigitalisasi, transparan, dan bertata kelola baik
- 2 Belanja PDN minimal 95% anggaran belanja barang dan jasa, prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri. Bukan sekedar packaging saja.
- 3 Hingga Agustus 2024 mengalihkan seluruh penggunaan KKP menjadi Kartu Kredit Indonesia
- 4 Indeks Kepatuhan belanja PDN yang disusun oleh BPKP sebagai *early warning system* sebagai dasar pendampingan dan pengawasan oleh Kejaksaan, kepolisian, OJK dan BI, serta sebagai dasar pemberian insentif dan disinsentif
- 5 Belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri memprioritaskan penggunaan PDN dan pembayaran menggunakan Rupiah
- 6 Mengembangkan *roadmap* pengurangan impor, dengan target impor maksimal 5%

Optimalisasi Bonus Demografi



Gambar 7. Proyeksi bonus demografi di Indonesia
Sumber: BPS

60

Juta Lapangan Pekerjaan
layak/formal/kelas menengah
Harus Tercipta

*Untuk mencapai 80% penduduk economically secure/
middle class society pada 2045*

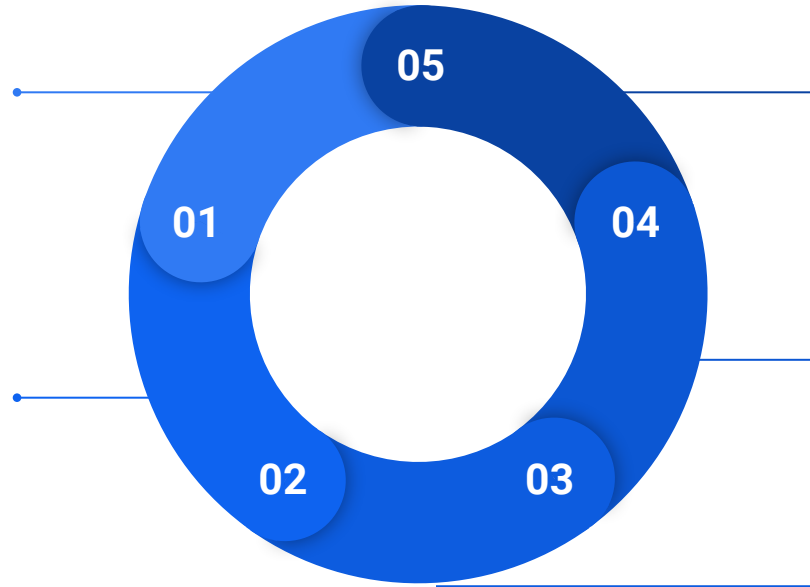
Bonus demografi akan mencapai puncak pada 2030-an, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebagai *demand* yang kuat atas produk dalam negeri, yang akan memiliki dampak ikutan berkembangnya industri dalam negeri dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Target Aksi Afirmasi Belanja PDN 2024

Pada 2024, target capaian belanja K/L, pemda, dan BUMN 95% dari anggaran belanja. Untuk itu perlu penyelesaian lima PR besar Aksi Afirmasi Belanja PDN:

Pengesahan RUU PBJ pada triwulan I
-LKPP-

Digitalisasi seluruh pengadaan (termasuk swakelola) dan Perluasan Penggunaan KKI
-Kemenkeu bersama LKPP-



Penyusunan panduan belanja PDN untuk belanja yang bersumber dari utang luar negeri.

-Bappenas, Kemenkeu & Kemenperin-

Implementasi insentif dan disinsentif belanja PDN

-BPKP, KemenpanRB, Kemendagri dan Kemenkeu-

Peningkatan sertifikasi TKDN dan pengembangan industri substitusi impor

-Kemenperin-



TERIMA KASIH

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

